

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1) Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dikatakan berintegritas jika memenuhi dua partikularitas yang penting dalam laporan keuangan yaitu relevan dan dapat diandalkan. Informasi keuangan yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada informasi tersebut. Dalam penelitian ini, integritas laporan keuangan diukur dengan konservatisme. Konservatisme merupakan perilaku dalam menghadapi ketidakpastian untuk menentukan tindakan dan keputusan berdasarkan hasil yang terjelek dari ketidakpastian tersebut (Suwardjono, 2010:245). Adapun alasan prinsip konservatisme digunakan adalah karena kecenderungan untuk melebih-lebihkan laba dalam pelaporan keuangan dapat dikurangi dengan menerapkan sikap pesimisme untuk mengimbangi optimisme yang berlebihan dari manajer.

Instrumen penelitian menggunakan model indeks konservatisme, yang dikemukakan oleh Penmann dan Zhang menjelaskan kualitas laba yang dihasilkan tergantung dari pertumbuhan investasi perusahaan. Variabel pengukuran integritas informasi laporan keuangan yang menggunakan indeks konservatisme MBV.

Rumusnya adalah:

$$MBV = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$



Dimana:

Harga Pasar Saham = Harga closing saham per lembar

Nilai Buku Saham = Jumlah ekuitas / Jumlah saham beredar

2) *Good Corporate Governance*

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Tata kelola perusahaan adalah sistem atau proses yang mengatur serta mengendalikan hubungan antara manajemen dengan seluruh pihak yang berkepentingan dalam perusahaan atau dapat disebut juga dengan *stakeholder*.

Definisi yang diungkapkan oleh OECD dalam *Principles of Corporate Governance*, yaitu

“Sistem yang mengatur tata hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan.”

Prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan perkembangan terhadap kinerja suatu perusahaan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terbukti dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan dan juga dapat mengembangkan kualitas laporan keuangan.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) adalah sebagai berikut:

a. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan undang-undang serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta karyawan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya dengan tujuan menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan.

c. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen tanpa ada campur tangan dari pihak lain saat melakukan pengambilan keputusan demi keberlangsungan hidup perusahaan dan melindungi hak-hak pemegang saham.

d. Transparansi (*Transparency*)

Memberikan jaminan adanya pengungkapan yang tepat waktu akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Selain itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dandisajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.

e. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus menyediakan dan dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparan dan wajar. Selain itu perusahaan juga harus dikelola sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya.

Menurut Sutojo dan Aldridge, *good corporate governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham
- 3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5) Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Sedangkan menurut Daniri (dalam Iswara, 2014), manfaat penerapan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan.
- 3) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

Mekanisme *Good Corporate Governance* :

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan sejumlah persenan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilaksanakan oleh pemilik akan semakin efektif dan efisien sebab manajemen akan semakin berhati-hati (Sujoko, dalam Rahma, 2014) bekerja untuk pemilik modal. Investor institusional mempunyai kekuasaan dalam memungut suara yang besar untuk berpihak pada manajemen atau bahkan memaksanya untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengambil keputusan sesuai dengan kepentingannya dan mengabaikan tujuan meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh perusahaan asuransi, institusi keuangan dana pensiun, *investment banking*, dan perusahaan lainnya yang terkait dengan kategori tersebut. Institusi mempunyai kekuasaan untuk mendominasi mayoritas saham karena memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Kepemilikan institusional menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, karena berperan dalam memonitor manajer yang mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional akan memajukan pengawasanperforma manajer yang lebih maksimal karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap performa manajer (Wardhani et.al, 2017).

Variabel Kepemilikan Institusional (KI) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki Institusi}}{\sum \text{Saham beredar}} \times 100\%$$

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajemen merupakan sebagian pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam menentukan keputusan perusahaan (Dewi, 2017). Keberadaan kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan asumsi yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat jika kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan manajemen yang besar akan efektif memantauperforma perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Insider ownership mendeskripsikan persentase besarnya kepemilikan saham oleh manajemen. Menurut Wahidahwati (Rahma, 2014) menyatakan bahwa pihak manajerial dalam suatu perusahaan adalah pihak yang secara aktif berperan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan. Masalah keagenan mungkin akan terjadi jika pihak manajer tidak memiliki saham mayoritas perusahaan, sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingannya sendiri dan tidak memaksimalkan nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan pendanaan.

Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan (Marius dan Indah, 2017). Variabel Kepemilikan Manajemen (KM) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki Manajerial}}{\sum \text{Saham beredar}} \times 100\%$$

c. Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak diperbolehkan mempunyai asosiasi apapun yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Penyusunan dewan komisaris independen diharapkan akan melindungi pemegang saham. Beberapa perusahaan memiliki jumlah komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen diukur dari presentase jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dari seluruh jumlah dewan komisaris (Rimardhani dkk, 2016).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sesuai Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-339./BEJ/07-2001 butir C mengenai *board governance* yang terdiri dari Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan bahwa untuk mencapai *good corporate governance*, jumlah komisaris independen yang harus terdapat dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Permasalahan yang timbul dalam penerapan *corporate governance* apabila *Chief Executive Officer* (CEO) mempunyai kekuatan lebih besar dibandingkan dewan komisaris sedangkan fungsi dewan komisaris adalah mengawasi kinerja dewan direksi yang dipimpin CEO tersebut. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris (Wardani, dalam Irwansyah, 2019). Penelitian Daryatno, Siallagan dan Machfoedz (Irwansyah, 2019) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan dengan integritas laporan keuangan perusahaan.

Ukuran dewan komisaris independen dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Ira, 2017):

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Dewan komisaris independen}}{\sum \text{Dewan komisaris}}$$

d. Kualitas Audit

Kualitas Audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kualitas aktivitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam pencapaian tujuan (Bastian, 2014). Kualitas Audit merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditetapkan dan melaporkan hasil auditnya berdasarkan kecukupan bukti yang ada kepada pihak yang memiliki kepentingan.

Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, melalui kompetensi (keahlian) dan independensi, deteksi salah saji, kesesuaian dengan SPAP, kepatuhan terhadap SOP, risiko audit, prinsip kehati-hatian, proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor, dan perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner (Deli et.al, 2015). Simamora mengemukakan 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku professional, serta standar teknis. Selain itu akuntan publik harus berdasar pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), melalui Standar auditing yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP 2001). Moizer (dalam Deli et.al, 2015) menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan pada standard yang telah digariskan.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (Murti & Firmansyah, 2017), audit yang dilaksanakan akuntan publik dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan standar auditing. Standar auditing merupakan dasar umum untuk membantu akuntan publik melakukan tanggung jawab profesionalnya atas laporan keuangan yang diaudit. Standar auditing juga meliputi kualitas profesional (*professional quality*) dan pertimbangan (*judgement*) akuntan publik yang digunakan dalam pelaksanaan dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penyusunan laporan audit. Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 1 (SA 150) meliputi:

a. Standar Umum

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

- 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaikbaiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- 3) Bukti audit kompeten yang dukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

- 1) Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3) Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada dasarnya dalam informasi ekonomi, teori agensi berkembang menjadi dua bagian yaitu *positivist* dan *principle-agent* (Jensen,1983). Bagian tersebut mempunyai unit analisis yang sama yaitu kontrak antara principal dengan *agent*. Keduanya juga memiliki perkiraan yang sama perihal anggota, organisasi, dan informasi. (Kurniawansyah, 2018).

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral mempunyaikewajiban untuk mengoptimalkan keuntungan principal.

Dalam Permada (2018), teori keagenan memaparkan adanya pemisahan hak milik perusahaan dan pertanggungjawaban atas pembuatan keputusan. Hubungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keagenan selalu menimbulkan adanya permasalahan antara pemilik dan agen karena terjadinya perbedaan pola pikir serta perbedaan kepentingan yang menonjol.

Berdasarkan bentuk formal ketika kontrak antara principal dan *agent* berdasarkan hasil, maka *agent* akan cenderung berperilaku sesuai dengan kepentingan principal karena sistem informasi menginformasikan kepada principal apa yang sedang dilakukan oleh *agent*, sehingga *agent* menyadari bahwa mereka tidak dapat menipu principal. Menurut Azwari (2016) menjelaskan pengaruh informasi pasar modal dan tenaga kerja efisien terhadap oportuniste manajerial, serta Fama dan Jensen dalam Kurniawansyah (2018) menjelaskan peran informasi yang dimainkan dewan direksi dalam mengendalikan perilaku manajerial. Dalam bentuk formal dapat dikatakan bahwa ketika principal memiliki informasi untuk memeriksa perilaku agen, agen lebih cenderung berperilaku sesuai dengan kepentingan principal. *Agency theory* positif dapat dianggap memperkaya perekonomian dengan menawarkan sudut pandang yang lebih kompleks tentang organisasi (Jensen & Meckling, 1976).

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menginspirasi penelitian ini adalah:

Penelitian Pertama	Pengaruh Good Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Laporan Keuangan Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Nama Peneliti	Septony B. Siahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Penelitian	2014
Variabel Penelitian	Variabel X : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen, Kualitas KAP, Ukuran Perusahaan. Variabel Y : Integritas Laporan Keuangan
Alat Analisis	Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil Penelitian	Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Namun kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independent, kualitas KAP, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Tetapi secara keseluruhan variable x berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
Penelitian Kedua	Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan.
Nama Peneliti	Pancawati
Tahun Penelitian	2010
Variabel Penelitian	Variabel X : Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, komite Audit, dan Kualitas Audit. Variabel Y : Integritas Laporan Keuangan.
Alat Analisis	Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil Penelitian	Secara parsial, hanya kepemilikan manajerial yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
Penelitian Ketiga	Pengaruh Independensi, Mekanisme Good Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie),
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Laporan Keuangan
Nama Peneliti	Mudasetia & Nur Solikhah
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Variabel X : Independensi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris, Komite Audit, Kualitas Audit. Variabel Y : Integritas Laporan Keuangan.
Alat Analisis	Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil Penelitian	Tidak ada yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi yang termasuk perusahaan asuransi, bank, atau kepemilikan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusi, maka akan ada yang mendorong pengawasan terhadap kinerja manajemen, karena pemegang saham institusi memiliki kemampuan dan profesional yang baik dalam menilai laporan yang disajikan oleh manajemen. Kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan *monitoring* terhadap perilaku manajer selaku *agent* dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan. Sehingga kepemilikan institusional diharapkan dapat mengurangi konflik yang terjadi antara *principle* dan *agent* serta meningkatkan kejujuran dan keandalan laporan keuangan.



Hubungkan dengan Teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh investor institusional, maka semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen, sehingga akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan laporan keuangan sehingga kinerja juga meningkat.

Penelitian oleh Wulandari dan Budiarta (2014), menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin tinggi integritas laporan keuangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan

Manajer yang memegang saham perusahaan akan ditinjau oleh pihak-pihak yang terkait dalam kontrak seperti pemilihan komite audit yang menciptakan permintaan untuk pelaporan keuangan berkualitas oleh pemegang saham, kreditur, dan pengguna laporan keuangan untuk memastikan efisiensi kontrak yang dibuat. Dengan demikian manajemen akan mempunyai motivasi untuk menyiapkan laporan keuangan berkualitas. Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan manajerial, diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan perusahaan dikarenakan manajemen memiliki tanggung jawab untuk membuat perusahaan tetap bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Persoalan ini didukung oleh Astria (Haq, et.al 2017) yang menyatakan bahwa meningkatnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajer akan mengurangi resiko tindakan manipulasi.

Kepemilikan manajerial akan cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan dan melaporkan laporan keuangan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi yang benar dan jujur. Hal ini dikarenakan semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, maka akan meningkatkan integritas laporan keuangan. Sebagai pihak yang memiliki perusahaan tentunya manajer akan lebih memperhatikan di setiap tindakan yang dilakukannya, sebab setiap keputusan yang diambil akan berdampak terhadap perusahaan.

Jika dihubungkan dengan teori keagenan maka jika semakin besar kepemilikan manajer, pasti akan membuat manajer akan lebih berusaha secara maksimal dalam meningkatkan integritas laporan keuangan perusahaan, karena manajer memiliki tanggung jawab yang besar (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian kepentingan antara agen dan pemilik akan ada *goal congruence* untuk meningkatkan integritas laporan keuangan.

Pemikiran ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2010) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen (POJK No. 33/POJK.04/2014). Komisaris independen bertujuan sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan khususnya untuk melindungi kepentingan pemegang saham, kreditor, serta pihak-pihak yang terkait (Qonitin & Yudowati, 2018). Dengan peran komisaris independen sebagai pengamat dan penyelia kinerja manajemen secara menyeluruh, maka tingkat informasi yang lebih andal dan tidak memihak dapat diharapkan dari perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tinggi (Saksakotama, 2014). Kehadiran komisaris independen pada perusahaan dapat membantu memecahkan masalah agensi yang mungkin terjadi. Sehingga hasil akhir laporan keuangan tidak hanya memihak sebagian pihak, namun dapat meliputi seluruh pihak yang berkepentingan.

Jika dihubungkan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa aktivitas monitoring oleh pihak independen sangat diperlukan. Jensen dan Meckling mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah pemonitor dalam hal ini komisaris independen maka kemungkinan terjadi konflik semakin rendah dan akhirnya akan menurunkan *agency cost*. Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan, jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemencenderung lebih berintegritas, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang memonitoring secara langsung dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan.

Pernyataan ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Suputra serta Nicolin dan Sabeni (dalam Qonitin & Yudowati, 2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Dari penjelasan diatas diharapkan semakin banyak jumlah komisaris independen, maka akan semakin meningkatkan tingkat integritas laporan keuangan suatu perusahaan, karena di dalam perusahaan terdapat badan pengawas yang independen dan berperan sebagai pelindung bagi kepentinganminoritas di luar manajemen yang akan mengawasi kinerja manajemen termasuk dalam penyusunan laporan keuangan agar tidak mudah dimanipulasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kualitas audit adalah kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditeenya. Kualitas audit sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemakai laporan keuangan lebih percaya pada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang dianggap berkualitas dibandingkan dengan auditor yang kurang berkualitas, karena mereka menganggap bahwa laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor yang berkualitas akan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kualitas audit yang baik juga dapat memungkinkan auditor dalam menemukan kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dari hasil audit dapat dijamin keintegritasannya.

Jika dihubungkan dengan Teori keagenan adalah bahwa teori agensi berisi tentang principal dan agen, dimana pemegang saham menjadi principal dan pemeriksa laporan keuangan menjadi agen. Principal (pemegang saham) menunjuk agent (auditor) untuk mengelola laporan keuangan perusahaan atas nama pemegang saham. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung padakemampuan teknikal auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung padaindependensi auditor tersebut. Kualitas audit yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan spesialisasi industri auditor. Perusahaan menggunakan jasa auditor yang memiliki spesialisasi industri tertentu dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan dukungan pasar modal. Hal ini mendorong perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang memiliki spesialisasi industri tertentu untuk menyajikan laporan keuangan secara benar dan jujur sehingga dapat meningkatkan integritas

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

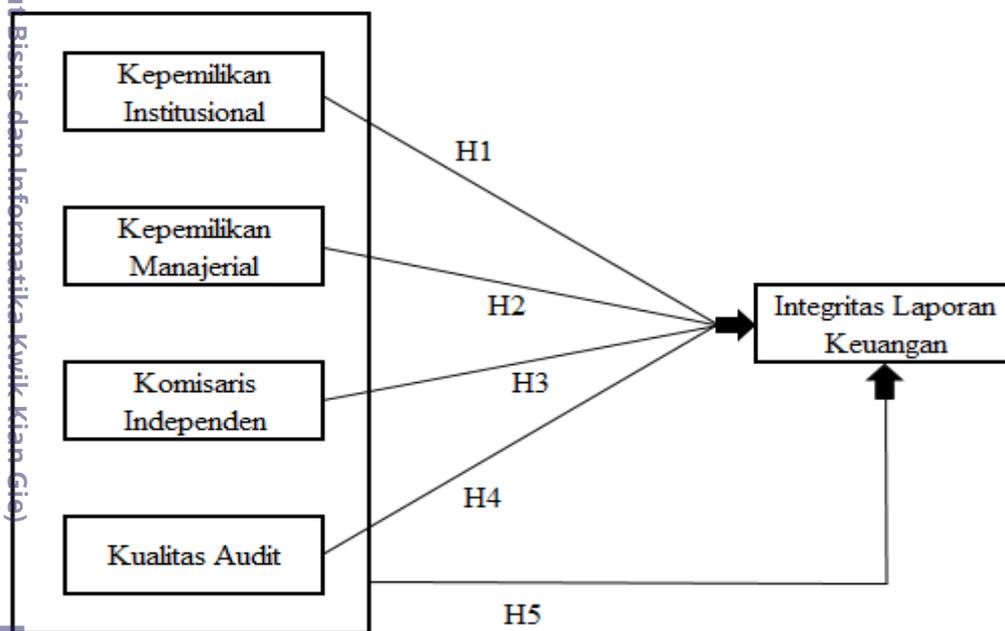
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan perusahaan tersebut (Fajaryani, 2015). Oleh karena itu, kualitas audit sangat penting karena semakin berkualitas hasil audit yang dihasilkan oleh auditor maka semakin tinggi integritas laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode tahun 2016-2018.

H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode tahun 2016-2018.

H3 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode tahun 2016-2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



H4 : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode tahun 2016-2018.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.